

BAB 5

PENUTUP

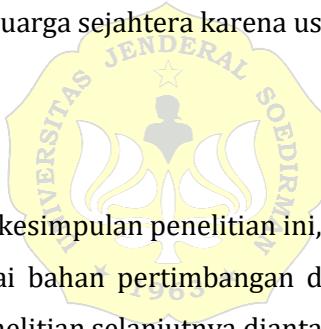
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diatas mengenai perubahan pola mentalitas miskin para penerima PKH di Kelurahan Kranji Purwokerto Timur, didapatkan kesimpulan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi angka kemiskinan sudah dilaksanakan dengan baik melalui Program Keluarga Harapan (PKH), dimulai dari merubah pola pikir yang lebih maju, pembimbingan serta pemberian materi yang berguna untuk kehidupan, dan mengupayakan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang lebih baik untuk generasi selanjutnya. Terlihat dari kerjasama dan sinergi yang baik mulai dari kebijakan pemerintah yang ketat, etos kerja pendamping PKH yang selalu memberi arahan serta masukan, kemudian pengaplikasian edukasi yang diberikan oleh para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kehidupan sehari-hari memberi dampak yang signifikan guna terciptanya kebermanfaatan yang berkelanjutan. Terutama, program PKH ini dirancang untuk menciptakan generasi yang lebih baik untuk para masyarakat miskin. Partisipasi anak seperti semangat menimba ilmu dan berani berkompetisi dalam pendidikan diharapkan mampu mendorong si anak memiliki pola pikir yang lebih maju dan terdukasi.

Kemiskinan antar-generasi selalu menjadi stigma negatif dari orang-orang yang mengatakan bahwa keluarga miskin akan menurunkan kemiskinannya pada sang anak, melalui kegiatan PKH ini diharapkan mampu mematahkan stigma tersebut di masa yang akan datang dengan diberikannya akses ini oleh pemerintah. Salah satu kegiatan unggulan PKH untuk merubah pola pikir yang lebih maju adalah dengan diadakannya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulannya yang bertempat di rumah salah satu KPM di Kelurahan Kranji Purwokerto Timur, dimana kegiatan ini menjadi sarana diskusi, edukasi, serta pengarahan motivasi pada anak untuk selalu terjaga semangatnya dalam mengejar pendidikan sekolah sampai tuntas.

Mayoritas penerima KPM di Kelurahan Kranji sudah memiliki usaha sendiri yang kebanyakan bergerak di bidang usaha makanan. Hasil dari wawancara yang dilakukan

mengatakan bahwa mereka tergerak untuk melakukan usaha karena persaingan kerja yang ketat ditambah lagi usia yang sudah melampaui 40 tahun membuat mereka harus berpikir bagaimana agar tidak memiliki rasa ketergantungan hanya pada bantuan sosial. Hal ini dikarenakan, mereka masih memiliki tanggung jawab pada anak yang masih bersekolah, kebutuhan sampingan dari sekolah terkadang memakan banyak biaya seperti iuran ekstrakurikuler, biaya untuk tugas praktek, serta biaya transportasi sehari-hari terlebih untuk ibu yang memiliki lebih dari satu anak. Semangat dan edukasi dari pendamping PKH itulah yang menjadi alasan bahwa mereka tergerak untuk berwirausaha. Meskipun dalam pengaplikasian usahanya mereka mengeluhkan bahwa pendapatan mereka kadang tidak menentu, pernah gagal dalam memulai usaha sebelumnya, atau terkadang harus mengalami kerugian, tetapi mereka tetap memiliki pendirian yang kuat untuk tetap mencobanya daripada tidak sama sekali. Mentalitas inilah yang diperlukan agar masyarakat miskin bisa beranjak dari kemiskinan dan berubah statusnya menjadi keluarga sejahtera karena usahanya sendiri.



B. Rekomendasi

Melanjutkan dari hasil kesimpulan penelitian ini, peneliti ingin menyumbangkan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan lebih lanjut untuk pemerintah maupun penelitian selanjutnya diantaranya:

1. Program PKH harus dijalankan sesuai dengan aturan Kementerian Sosial RI yang berlaku dengan memberikan bantuan kepada KPM PKH yang benar-benar membutuhkan guna terciptanya pemerataan pembangunan masyarakat sejahtera dan teredukasi pada masyarakat miskin.
2. Fungsi edukasi, pengarahan, serta pengawasan oleh para setiap pendamping PKH harus dijalankan dengan baik. Tanpa melibatkan perasaan iba atau takut akan pengambilan keputusan bagi para KPM yang memanfaatkan bantuan ini dengan cara yang salah. Beberapa KPM PKH yang secara sengaja melakukan upaya menyembunyikan transparasi penggunaan dana bantuan sebaiknya ditindak langsung dengan upaya pencabutan bantuan.

3. Pemerintah harus rutin melakukan evaluasi pada penerima bantuan PKH setiap bantuan tersebut disalurkan yakni 3 bulan sekali. Evaluasi bisa dilakukan dengan mengecek tingkat kehadiran KPM PKH pada pertemuan kelompok, transparansi aktivitas yang sedang aktif dilakukan KPM PKH disampaikan kepada pendamping PKH, serta evaluasi terpisah yang dilakukan oleh pendamping PKH dengan pemerintah pusat untuk mengutarakan informasi serta pencapaian pemberian materi yang disampaikan sejauh mana. Hal ini diupayakan agar modul materi pemberdayaan masyarakat miskin dari pemerintah bisa disampaikan dengan tuntas selama satu tahun penuh.

